

BAB II

STRATEGI GOLKAR DALAM POLITIK INDONESIA TAHUN 1998

2.1 Akar Pemikiran Politik Golkar

Golongan Karya (Golkar) memiliki akar pemikiran politik yang berawal dari gagasan Presiden Sukarno pada tahun 1956 yang menilai partai-partai politik telah gagal menuntaskan revolusi dan cenderung mementingkan perebutan kekuasaan. Sebagai gantinya, Sukarno mengusulkan pembentukan golongan fungsional atau golongan karya yang mewakili berbagai fungsi dalam masyarakat. Gagasan ini diwujudkan melalui Dewan Nasional dan kabinet Gotong Royong yang melibatkan buruh, petani, pemuda dan wanita. Presiden Soekarno menyanggupi untuk memimpin dewan ini.⁴⁴ Upaya ini menjadi cikal bakal lahirnya Golkar sebagai organisasi yang berbasis karya, bukan organisasi politik konvensional.

Perkembangan Golkar semakin nyata ketika Presiden Sukarno menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 193 tahun 1964 yang terbit pada 05 Agustus 1964 yang mengatur organisasi di dalam Front Nasional untuk berafiliasi dengan partai politik untuk bergabung menjadi suatu organisasi.⁴⁵ Pada 15 Oktober 1964, lima orang anggota Front Nasional dari Golongan Karya mengeluarkan sebuah undangan kepada semua organisasi yang dimaksudkan oleh Perpres No. 193/1964.⁴⁶ Berawal dari konsepsi tersebut dan untuk membendung pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) serta mempertahankan ideologi negara Pancasila,

⁴⁴ Farchan Bulkhin, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, Pilihan Artikel Prisma (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 268.

⁴⁵ Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer: Studi tentang Budaya Politik*, Jakarta: LP3ES, Tahun 1992.

⁴⁶ Perpres No. 193 Tahun 1964

pada awal Oktober 1964 Jenderal Nasution dan beberapa orang rekannya membuat suatu rencana untuk membentuk Sekber Golkar, sebuah organisasi yang akan digunakan untuk memelihara kekuatan kelompok anti-komunis.⁴⁷ Pada bulan yang bersamaan pula, terbentuk sebuah panitia yang terdiri dari anggota Gerakan Militer Pelajar, kelompok cendekiawan dan militer untuk mempersiapkan “Piagam Pernyataan Dasar Karyawan”.

Pada tengah malam 19 Oktober 1964, panitia yang menyusun “Piagam Pernyataan Dasar Karyawan” dan wakil dari 35 organisasi non-afiliasi berkumpul bersama menandatangani piagam. Kemudian pada pukul 12 siang hari, 20 Oktober 1964 panitia pelaksana Sekber Golkar akhirnya terbentuk. Panitia ini diketuai oleh Kolonel Djuhartono, kemudian empat wakil ketua, masing-masing adalah Imam Pratigny (NU), J. K. Tumakaka (PNI), Djamin Gintings (militer), dan S. Sukowati (Hankam). Berikutnya Dr. Amino Gondoutomo bertindak sebagai Sekretaris Jenderal, dan Sutomo Gondowongso SH sebagai wakil sekretaris.⁴⁸ Akhirnya, Sekretariat Bersama Golongan Karya atau yang disingkat sebagai Sekber Golkar resmi berdiri. Terhitung hingga Mei 1965, jumlah anggota Sekber Golkar sudah mencapai 129 organisasi.⁴⁹ Seiring sambutan yang luas, Sekber Golkar hendak mengembangkan diri dengan membuka cabang di daerah – daerah. Pengurus Dewan Harian sudah menginstruksikan masalah ini pada 10 Juni 1965. Isi instruksi itu adalah meminta kepada organ – organ yang tergabung dalam Sekber Golkar agar

⁴⁷ Farchan Bulkhin, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, Pilihan Artikel Prisma (Jakarta: LP3ES, 1991, hlm. 296.

⁴⁸ Leo Surya Dinata, *Golkar dan Militer-Studi Tentang Budaya Politik*, Jakarta: LP3ES, Tahun 1992. hlm. 15.

⁴⁹ Bahtiar Effendy, dkk. *Beringin Membangun Sejarah Politik Partai Golkar*, Bandung: Grafindo, Tahun 2012. hlm. 45

menghubunngi anggota Front Nasional di daerah terutama yang berasal dari golongan karya non-afiliasi.⁵⁰

Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I pada 9 – 11 Desember 1965 di Cipayung Bogor. Agenda Mukernas adalah penyusunan haluan Golongan Karya, program aksi, kondsolidasi dan penyusunan kader. Mukernas dihadiri oleh 160 organisasi Golkar tingkat pusat dan 13 pengurus daerah dan 2 orang peninjau.⁵¹ Hasil dari Mukernas I selain dari agenda yang telah ditentukan adalah melahirkan Dewan Pimpinan Harian Sekber Golkar yang baru, Soeharto yang masih berpangkat Majyen lahir sebagai salah satu dari lima Dewan Pembina Sekber Golkar lainnya yaitu Drs Chaerul Saleh, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Jenderal AH Nasution dan HM Mulyadi Djojomartono. Pada masa transisi Orde Lama menuju Orde Baru, Tidak ada partai politik yang mewakili kepentingan militer, kepentingan sipil selalu diwakili oleh partai politik. Hal itu menegaskan bahwa kehadiran Golkar di era Orde Baru ini dapat digambarkan sebagai pemenuhan keinginan para elit politik, yang diganti oleh ABRI pada awal Orde Baru dan diganti oleh teknokrat pada masa Orde Lama, dalam rangka pembaharuan politik di Indonesia.

Kehadiran Golkar sebagai perpanjangan tangan ABRI di lembaga sipil semakin mendesak kedudukan partai politik. Sebagian besar pimpinan Golkar di masing-masing tingkat dipimpin oleh ABRI yang masih aktif dikesatuannya. Hal

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 45

⁵¹ Pengurus daerah yang hadir diantaranya Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Aceh, Jawa Timur, Lampung, Kalimantan Selatam, Palembang, Sumatra Barat, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali dan Jakarta Raya. Sedangkan dua orang peninjau dari Pangdam XV/Patimura. Lihat, Imam Pratigyo, *Ungkapan Sejarah*, hlm. 109.

tersebut dapat dipahami bahwa Golkar pada masa Orde Baru didominasi oleh ABRI.⁵² Golkar bertransformasi menjadi alat politik utama di bawah pengaruh Soeharto dan berkembang dari Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada tanggal 20 Oktober 1964 hingga akhirnya menjadi Golkar pada tanggal 17 Juli 1971.⁵³ Terdapat tujuh organisasi utama Sekber Golkar atau biasa disebut Kelompok Induk Organisasi (KINO) yang dibentuk pada 09 Oktober 1969 melalui SK No. KEP/507/Sekber Golkar/1969 diantaranya Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI), Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM), Organisasi Profesi dan Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971.

Konsultasi dari DPP Sekber Golkar ke Dewan Pembina terjadi pada Pertemuan tanggal 31 Desember 1969 yang membahas Lambang Sekber Golkar, Soeharto berbicara halus tanpa menyinggung soal tanda gambar secara langsung. Soeharto hanya mengingatkan bahwa Sekber Golkar hendaknya menjadi pilar Orde Baru untuk pembangunan di segala bidang.⁵⁴ Sebagai pilar, Sekber Golkar harus bisa menunjukkan keutuhan tekad, kesatuan gerak dan tanggap akan tugas dan kewajibannya. Arahan itu ditangkap oleh DPP Sekber Golkar bahwa Dewan Pembina menghendaki satu tanda gambar. Dari arahan itu pula, dicapai kesepakatan pada 04 Februari 1970 bahwa Sekber Golkar akan mengikuti pemilu 1971 dengan

⁵² Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta: CV Rajawali, Tahun 1983, hlm. 164.

⁵³ Ibnu Alkhatib, U. *Dari Beringin ke Beringin: Sejarah, Kemelut, Resistensi, dan Daya Tahan Partai Golkar*. Yogyakarta: Ombak, Tahun 2009, hlm. 35.

⁵⁴ Bahtiar Effendy, dkk., *Beringin Membangun Sejarah Politik Partai Golkar*, Bandung: Grafindo, Tahun 2012. hlm. 76.

menggunakan satu tanda gambar. Isi dari kesepakatan itu adalah memutuskan satu nama bersama diajukan yaitu Golongan Karya (Golkar).

Golkar mempunyai doktrin yang terlahir pada bulan oktober 1978, doktrin tersebut muncul pada pelaksanaan Munas II Golkar di Denpasar Bali.⁵⁵ dapat membedakan organisasi ini dengan organisasi politik lainnya. Doktrin tersebut disahkan dalam Munas I yang selanjutnya disempurkan oleh DPP satu tahun setelah Munas. Doktrin, Ikrar dan Panji – panji/lambang Golongan Karya tersebut selanjutnya disahkan melalui keputusan DPP. Doktrin Golkar tersebut diberi nama “Karya Siaga Praja” yang berarti siap bekerja membangun negara. Nama tersebut mengandung makna tersirat mengikuti surya sengkala yang setiap katanya melambangkan angka tertentu. Karya melambangkan angka 4 (empat), Siaga melambangkan angka 6 (enam), Gatra melambangkan angka 9 (sembilan) dan Praja melambangkan angka 1 (satu). Jika digabungkan maka keluarlah angka 1964 yang merupakan tahun kelahiran Golongan Karya.⁵⁶

Doktrin Golkar dimulai dari suatu pemikiran filosofis mengenai hakekat karya dan hubungan karya dalam Pancasila. Doktrin Golkar mengembangkan suatu pandangan sosial politik bahwa:

1. Pengelompokan politik yang hanya didasarkan atas tingkatan kelas sosial, aliran agama dan atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan golongan etnis akan menimbulkan pertentangan yang berlarut – larut.

⁵⁵ DPP Golkar, *20 Tahun Golkar*, hlm. 19.

⁵⁶ *Op.cit*, hlm. 90.

2. Kekaryaannya merupakan satu-satunya kemungkinan yang baik yang dapat menyalurkan persamaan kepentingan dan mengatasi pertentangan kepentingan yang ada dalam masyarakat kreatif. Pengelompokan yang sesuai dengan kodrat manusia dan tuntutan zaman.
3. Kekaryaannya merupakan saluran yang kreatif sebab berintikan pembagian kerja yang jelas atas masing-masing bentuk pengabdian yang didasarkan atas hasil daya, cipta, karsa serta karya. Melalui kekaryaannya pula hubungan timbal balik dapat diselaraskan ke arah pemenuhan keperluan umum secara serasi.⁵⁷

Pandangan ini berawal dari suatu proposisi bahwa pengelompokan sosial politik berdasarkan latar belakang primordial dan kelas sosial adalah pangkal dari konflik sosial. Doktrin Golkar terasa pesimistis apabila masa depan Indonesia didasarkan pada pengelompokan primordial dan kelas sosial. Hal tersebut menjadikan Doktrin Golkar mempunyai visi bahwa pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang ideal adalah pengelompokan berdasarkan karya dan kekaryaannya yang berintikan pembagian kerja yang jelas. Pandangan ini menjadikan arah perjuangan Golkar diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Doktrin kekaryaannya Golkar selama Orde Baru ditanamkan secara masif ke masyarakat yaitu doktrin yang menekankan pengelompokan sosial-politik berdasarkan fungsi kerja, gotong royong, dan pembangunan nasional yang

⁵⁷ Keputusan Munas II Nomor X/MUNAS-II/GOLKAR/1978 tentang “Doktrin Golongan Karya, Karya Siaga Gatra Praja”.

terimplementasikan lewat Birokratisasi politik. Arah perjuangan itu disebut “Hakekat Kekaryaan” yang rumusannya sebagai berikut:

1. Kekaryaan berarti suatu prinsip perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia diatas landasan Pancasila dan UUD 1945 yang dilaksanakan dengan pemberian dharma bhakti dalam bentuk karya sesuai dengan jenis kerja dan atau lingkungan kerja.
2. Kekaryaan adalah prinsip perjuangan Golongan Karya dalam mempelopori dan melaksanakan pengisian cita-cita proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yaitu pembentukan masyarakat adil dan makmur rokhaniah dan jasmaniah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵⁸

Doktrin perjuangan ini membuat Golkar mempunyai kelengkapan organisasi sosial politik yang utuh. Visi misi yang terangkum dalam Doktrin Golkar, organisasi yang hendak memperjuangkan Doktrin tersebut, serta ada atribut organisasi yang diperlukan. Golkar memainkan peran penting sebagai alat politik untuk pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto berkembang menjadi kekuatan politik alternatif yang mendukung modernisasi dan non-sektarian. Golkar menjadi mesin politik untuk mengamankan dan memperlancar agenda politik dan pembangunan Orde Baru.⁵⁹ Namun, dalam Aksi Golkar pada tahun 1998 Doktrin Kekaryaan gagal menjadi panduan operasional Golkar karena pengambilan keputusan lebih didominasi oleh pertarungan antar faksi elite daripada konsensus fungsional, sementara aksi-aksi partai cenderung bersifat reaktif dan

⁵⁸ Keputusan Munas II Nomor X/MUNAS-II/GOLKAR/1978.

⁵⁹ Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 40.

pragmatis dalam merespons tekanan eksternal seperti demonstrasi dan krisis ekonomi, bukan berlandaskan implementasi doktrin. Restrukturisasi organisasi pasca Soeharto pun lebih merupakan upaya rekonsiliasi antara doktrin asli dengan tuntutan demokratisasi, meskipun ketegangan antara identitas kekaryaan dan praktik politik elektoral tetap tersisa. Dengan demikian, tahun 1998 menjadi fase kritis yang menguji ketahanan Doktrin Kekaryaan sebagai landasan ideologis sekaligus memperlihatkan kemampuan adaptasi Golkar dalam menghadapi perubahan politik yang radikal.

2.2 Strategi Politik Golkar Era Orde Baru

Pemilu 1971 menjadi awal kemenangan bagi Golkar dan Soeharto di awal Orde Baru. Tanggal 17 Juli 1971 Golkar langsung mengadakan pertemuan unsur – unsur strategis untuk meneruskan agenda reorganisasi yang sudah dimulai sejak tahun 1969. Terdapat lima kesepakatan dalam agenda reorganisasi tersebut tertuang dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Umum Golkar No.KEP/101/VII/GOLKAR/1971, yaitu:

1. Nama Sekber Golkar diganti menjadi Golkar.
2. Struktur organisasi terdiri dari Pusat, Daerah tingkat I dan Daerah tingkat II.
3. Istilah Kino tidak dipergunakan lagi.
4. Ormas – ormas yang terhimpun dalam Kino diserahkan pembinaan dan pengendaliannya kepada Golkar, karena Kino tidak lagi menjadi badan pelaksana perjuangan politik.

5. Peleburan diri harus selesai secara teknis menjelang Munas I Golkar yang direncanakan berlangsung pada tahun 1973.⁶⁰

Struktur organisasi baru DPP Golkar lahir dua hari setelah keputusan itu dibuat yakni pada 19 Juli 1971 yang menjadikan Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina dengan tujuh belas orang anggotanya. Posisi Ketua Dewan Pembina inilah yang akan dimanfaatkan oleh Soeharto selama Orde baru dalam mengendalikan Golkar untuk melanggengkan kekuasaannya sebagai Presiden. Hal tersebut kemudian diperkuat pada tahun 1983 dalam AD/ART yang telah dibuat. Dewan Pembina memiliki kewenangan untuk membatalkan semua keputusan DPP, lebih jauh lagi bahkan bisa membekukan DPP bila melenceng dari keputusan Munas. Dewan Pembina juga bisa menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dan menyusun komposisi DPP Golkar.⁶¹ Dengan kewenangan yang sangat luar biasa tersebut, Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina bisa menentukan hitam-putihnya Golkar. Berbagai kebijakan strategis masa Orde Baru seperti menentukan wakil presiden, kabinet, gubernur, bupati bahkan menentukan daftar calon anggota DPR/MPR bisa dilakukan oleh Ketua Dewan pembina.⁶² Hal tersebut menjadi strategi Golkar untuk tetap eksis menjadi kendaraan politik di masa Orde Baru dan Soeharto menjadi orang yang mempunyai kewenangan superior dalam mengendalikan Golkar.

⁶⁰ DPP Golkar, 30 Tahun Golkar, hlm. 105. dalam Bahtiar Effendy, dkk., *Beringin Membangun Sejarah Politik Partai Golkar*, Bandung: Grafindo, Tahun 2012. hlm. 85.

⁶¹ Dwi Prasdi N, dkk. *Golkar Retak?*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi. Tahun 1999, hlm. 2.

⁶² AD/ART Golkar, 1983

Sebagai Organisasi Fungsional yang menjadi pilar utama Orde Baru, Golkar mulanya berdiri dengan ideologi modernisasi dan non sektarian berubah menjadi berorientasi kepada program pembangunan Soeharto. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, Golkar berpendapat bahwa perlu diarahkan secara dinamis penerapan Wawasan Nusantara, yaitu Wawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari kepulauan dan perairan sekitarnya, sebagai suatu kesatuan idiologi.⁶³ Pendukung utama Golkar adalah kelompok fungsional yang umumnya kelas menengah terdidik, lebih khusus lagi yaitu para priyayi dan abangan dalam konteks sosiologi masyarakat Jawa.⁶⁴ Hal ini tentu bertolak belakang dengan realitas sosial kultural masyarakat Indonesia yang masih terkotak-kotak dalam pandangan ideologis sektarian. Oleh sebab itu Orde Baru selalu berusaha memenangkan Golkar dengan memberdayakan Militer dan Birokrasi yang sama sebagai perpanjangan tangan negara.

Selama era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Golkar bertransformasi menjadi alat politik utama rezim tersebut. Golkar berhasil membangun kelembagaan politik yang kuat dengan jaringan organisasi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Golkar memainkan peran penting dalam mengonsolidasikan kekuasaan Orde Baru dan memastikan stabilitas politik yang diinginkan rezim. Terdapat tiga strategi politik utama yang digunakan Golkar untuk mendukung kekuasaan Soeharto. Pertama, melalui jalur ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dengan strategi dwifungsi ABRI, yang memberikan

⁶³ DPP Golkar, *20 Tahun Golkar*, hlm. 19.

⁶⁴ Ibnu Alkhatab, U. *Dari Beringin ke Beringin: Sejarah, Kemelut, Resistensi, dan Daya Tahan Partai Golkar*. Yogyakarta: Ombak, Tahun 2009, hlm. 27.

peran ganda kepada militer dalam pertahanan keamanan dan sosial-politik. Hal ini menguntungkan Golkar karena elit politik diisi oleh TNI-AD yang kompak mendukung Soeharto. Kedua, melalui jalur birokrasi dengan Peraturan Monoloyalitas PNS, yang mewajibkan PNS menyalurkan aspirasi politiknya ke Golkar, yang kemudian digunakan untuk memobilisasi dukungan suara bagi Golkar. Ketiga, melalui isu politik pembangunan nasional, yang menonjolkan kestabilan politik dan peningkatan kesejahteraan rakyat untuk meraih simpati rakyat dan memenangkan pemilu.

Dinamika internal mulai berubah ketika Kursi Ketua Umum Golkar menjelang era Reformasi diisi oleh Harmoko yang terpilih dalam Munas V tahun 1993. Komposisi kepengurusan baru terbentuk Pada kepemimpinan Harmoko, terdapat dua orang putra – putri Soeharto yaitu Siti Hardianti Rukmana dan Bambang Trihadmojo. Hal tersebut menghadirkan suasana baru dalam dinamika politik Golkar, secara tidak langsung putra – putri Soeharto telah menjadi kekuatan politik tersendiri. Harmoko selaku Ketua Umum Golkar dihadapkan situasi yang tidak nyaman dengan keberadaan Putra-Putri Soeharto sebagai pengurus teras Golkar pada tahun 1993 - 1998.⁶⁵ Masuknya putra – putri Soeharto dalam ranah politik dengan menjadi pengurus teras Golkar secara tidak langsung berpengaruh terhadap kewibawaan Harmoko sebagai Ketua Umum Golkar. Orang – orang tidak hanya sowan kepada Ketua Umum tapi juga kepada putra – putri Soeharto. Selain

⁶⁵ Burhanuddin N, *Harakiri Politik Tokoh Nasional & Elit Golkar*, Jakarta: RMBOOKS, Tahun 2007, hlm. 39.

itu, laporan perkembangan Golkar yang biasanya hanya disampaikan Ketua Umum kepada Soeharto, sekarang hal itu bertambah dengan putra – putrinya.

2.3 Strategi Politik Golkar Menjelang Reformasi

Golkar menghadapi tantangan berat memasuki masa transisi kekuasaan pada 1998 sebagai pilar utama rezim Orde Baru, Golkar harus mengantisipasi perubahan politik yang radikal akibat krisis ekonomi dan gerakan reformasi. Dalam menghadapi situasi ini, Golkar merancang berbagai strategi untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan politik nasional. Strategi dimulai dengan membentuk sebuah lembaga baru yaitu Badan Pengelola Kader Golkar Pusat yang disingkat Bapekapus.⁶⁶ Lembaga ini dipimpin oleh Abdul Gafur dengan sekretaris M. Yamin Tawari. DPP Golkar mengeluarkan “Rencana Induk Organisasi” yang membagi kader menjadi dua jenis yaitu kader penggerakan territorial desa (karakterdes) dan kader penggerak fungsional (Karsinal). Target yang ditetapkan DPP setiap anggota Golkar di pedesaan minimal sebanyak 5 persen sudah harus bisa menjadi kader inti penggerak pedesaan. DPP Golkar juga mulai memperkenalkan diklat kader lanjutan dan spesifik. Penataan kaderisasi ini menjadi penting karena Anggaran Dasar sudah menetapkan bahwa kriteria kader Golkar di samping terjaga dedikasi dan loyalitasnya juga harus mengikuti proses kaderisasi melalui Pendidikan dan atau Latihan. Inilah yang menjadi strategi pertama Golkar untuk bisa mempertahankan eksistensinya ditengah situasi yang mulai adanya desakan kepada Golkar.

⁶⁶ Bahtiar Effendy, dkk, *Beringin Membangun Sejarah Politik Partai Golkar*, Bandung: Grafindo, Tahun 2012. hlm. 129.

Strategi kedua yang dicanangkan Golkar adalah “Tiada hari Tanpa Penggalangan”. Agenda inilah yang kemudian dijabarkan DPP dalam bentuk program “Temu Kader” yang dicetuskan oleh Harmoko dimulai dari Purwakarta, Jawa Barat pada Januari 1994. Harmoko melakukan program ini dengan berkeliling daerah dan menyapa kader-kader Golkar. Aktivitas ini berakhir di Sulawesi Selatan pada 26 April 1996, dengan total 305 Daerah Tingkat II di 27 provinsi yang dikunjungi. Dalam pandangan Harmoko, “Temu Kader” adalah wahana untuk mengembangkan komunikasi dan pendidikan politik.

Kedua agenda ini merupakan langkah Golkar dalam menjaring suara rakyat menjelang reformasi. Agenda diklat lanjutan yang dilakukan oleh Bapekapus menekankan minimal sebanyak 5 persen sudah harus bisa menjadi kader inti penggerak pedesaan. Sedangkan temu kader merupakan forum dialog dengan masyarakat secara langsung, agenda ini menjadi populer karena ditunjang oleh kepiawaian Harmoko dalam melakukan komunikasi publik. Manfaat temu kader sebenarnya tidak hanya dalam rangka membumikan Golkar di kalangan masyarakat bawah, tetapi melalui agenda tersebut DPP Golkar mempunyai media penyerapan aspirasi secara langsung yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui anggota Fraksi Karya Pembangunan (FKP) yang ada di DPR.

Harmoko mengatakan “Percayalah, bahwa Golkar tidak akan menyakiti hati rakyat dan tidak akan mengecewakan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada Golkar lima kali pemilu. Golkar akan tetap berjuang untuk kepentingan masyarakat dan telah bertekad bulat untuk mensejahterakan masyarakat” Ujar

Harmoko dalam salah satu pidatonya saat melaksanakan program Temu Kader.⁶⁷ “Watak Golkar, dimanapun dia berada selalu membantu rakyat. Sekali – kali tidak akan membuat rakyat susah. Kehadirannya harus selalu memberi nilai tambah bagi kehidupan rakyat” lanjut Harmoko secara tegas.

Setelah Program Temu kader selesai dilaksanakan, Golkar mengadakan Rapim pada tanggal 19 Oktober 1997. Harmoko sebagai Ketua Umum Golkar mengatasnamakan aspirasi rakyat untuk meminta Soeharto menjadi Presiden lagi. “Tidak ada figur lain, tidak ada tokoh lain, Inilah kehendak rakyat banyak dan aspirasi demokrasi. Marilah aspirasi ini kita tetapkan menjadi keputusan organisasi. Kemenangan 74,51 persen merupakan manifestasi dari dukungan rakyat,” kata Harmoko bersemangat dan berapi-api dalam pidato pada saat Rapim. Begitu juga pada Sidang Umum Maret 1998, seluruh anggota MPR/DPR dari berbagai fraksi termasuk Fraksi Karya Pembangunan (FKP) secara aklamasi memilih Soeharto sebagai Presiden untuk ketujuh kalinya.⁶⁸

Dalam menanggapi permintaan Soeharto untuk meneliti kembali pencalonannya, Harmoko berjanji akan melakukan polling dan mempertanyakan kembali kepada rakyat. Namun polling itu sebenarnya tidak pernah ada dan hanya *lip service*. Harmoko pun mengakui bahwa polling yang dilakukan memang bukan polling dalam arti sebenarnya. Harmoko hanya melakukan *check and recheck* pada semua DPD Golkar seluruh Indonesia mengenai pencalonan Soeharto.⁶⁹ Sementara

⁶⁷ *Op.Cit.*, hlm. 71

⁶⁸ Suara Karya, 18/10/1998

⁶⁹ Dwi Prasdi N, dkk. *Golkar Retak?*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi. Tahun 1999, hlm. 6.

itu, masyarakat luas menghujat dan mempersoalkan kepemimpinan Soeharto yang terlalu berbau kolusi, korupsi dan nepotisme yang parah.⁷⁰

Tekanan eksternal berupa krisis moneter dan desakan mahasiswa yang melanda Indonesia sejak Agustus 1997 memburuknya kondisi sosial ekonomi memaksa Golkar untuk meninjau ulang strategi politiknya. Krisis moneter yang terjadi tidak bisa diatasi dengan baik oleh pemerintah bergeser menjadi krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Soeharto. Satu – satunya cara untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan ini adalah dengan mengganti Soeharto sebagai Presiden.⁷¹ Beberapa elite Golkar mulai mempertimbangkan realitas politik baru bahwa keberlanjutan Soeharto tidak lagi sejalan dengan *survival* politik partai.

Dalam menghadapi tekanan eksternal dan internal, Golkar kemudian menerapkan strategi barunya yaitu strategi politik adaptif. Kubu reformis yang dipimpin oleh Harmoko dan Ginandjar mulai membangun wacana tentang perlunya regenerasi nasional dan merespon tuntutan mahasiswa serta masyarakat sipil yang menghendaki reformasi. Harmoko menggunakan pendekatan kepemimpinan yang adaptif mampu menangani kompleksitas, ketidakpastian, dan perubahan. Hal ini karena seorang pemimpin yang adaptif akan berusaha memobilisasi pengetahuan dengan cepat, responsif terhadap kebutuhan kontekstual, dan berusaha memberdayakan rekan kerja untuk bersama-sama bertindak.⁷² Strategi politik

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 8.

⁷¹ Tempo Interaktif, 24/01/1998

⁷² Adawiyah, R. Kepemimpinan Adaptif Untuk Menavigasi Geopolitik: Tantangan Dan Peluang. *Paraduta: Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(3), Tahun 2024, hlm 114.

adaptif dilakukan oleh Harmoko melalui harakiri politik dengan mengatasnamakan Pimpinan DPR/MPR yang menyatakan permintaan agar Soeharto mengundurkan diri demi keselamatan bangsa. Ini menjadi langkah dramatis, mengingat sebelumnya Golkar adalah pendukung utama Soeharto. Namun, langkah ini menunjukkan orientasi pragmatis Golkar demi menjaga relevansi dalam sistem politik yang tengah berubah. Perpecahan internal Golkar antara kubu loyalis dan reformis semakin terlihat menjelang Sidang Umum MPR 1998. Walaupun secara formal Harmoko bersama jalur ABG (ABRI, Birokrasi, Golkar) sempat mencalonkan kembali Soeharto, pada akhirnya strategi penyelamatan organisasi sosial politik lebih diutamakan dibanding mempertahankan individu.

Menjelang Sidang Umum MPR 11 Maret 1998, Pimpinan tiga jalur dalam tubuh Golkar atau yang dikenal dengan jalur ABG (ABRI, Birokrasi, Golkar) yaitu Jenderal Feisal Tanjung, Yogie SM dan Harmoko membulatkan tekad untuk mencalonkan Soeharto kembali sebagai Presiden periode 1998 – 2003 dengan mengabaikan realitas politik pada saat itu.⁷³ Hal tersebut sengaja dilakukan oleh pimpinan Golkar sebagai langkah menjalankan strateginya untuk menyelamatkan Golkar yang telah mengalami penurunan kepercayaan terhadap pemerintah Soeharto lewat resistensi masyarakat yang tinggi dan melakukan harakiri Politik. Momentum untuk melaksanakan strategi inipun datang pada tanggal 18 Mei 1998 yang kemudian Harmoko meminta Soeharto untuk mengundurkan diri.

Pencalonan yang dilakukan oleh ketiga pimpinan yang ada di tubuh Golkar membuat Soeharto meminta agar dipikirkan kembali pencalonan dirinya sebagai

⁷³ *Op.cit.* hlm. 42.

presiden. Soeharto tidak ingin pengangkatannya menghilangkan mekanisme suksesi yang berjalan di Indonesia. Soeharto merasa bahwa dirinya sudah TOPP (Tua, Ompong, Peot, Pikun).⁷⁴ Baginya bukan masalah jika tidak dicalonkan kembali menjadi Presiden karena Soeharto akan *lengser keprabon madeg pandhito*, yaitu mundur dari kedudukan prabu atau raja untuk berkonsentrasi sebagai pendeta atau penasehat yang mana jabatan itu lebih terhormat dibanding Presiden.⁷⁵ Suatu posisi dalam kasta Hindu yang lebih tinggi dari kedudukan seorang prabu atau raja karena peran dan fungsinya yang memberikan nasihat dan masukan kepada prabu. Pernyataan tersebut menjadikan para tokoh Golkar beranggapan bahwa negara dianggap sebagai kerajaannya.

Dalam realitas transisi tersebut, Golkar memosisikan dirinya sebagai organisasi yang mampu membaca arah perubahan. Dukungan kepada B.J. Habibie sebagai pengganti Soeharto membuktikan bahwa Golkar masih menguasai jaringan politik pasca-Orde Baru, meskipun harus melakukan reformasi internal besar-besaran. Strategi kaderisasi, penggalangan massa melalui temu kader, serta adaptasi terhadap tuntutan reformasi menjadi bagian integral dari strategi Golkar dalam memastikan kelangsungan hidupnya sebagai kekuatan politik utama. Strategi yang dijalankan Golkar selama transisi 1998 mengukuhkan bahwa organisasi ini adalah contoh nyata dari adaptasi elite dan institusi politik dalam menghadapi pergeseran rezim. Dengan demikian, Strategi Golkar dalam Transisi Kekuasaan dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk mentransformasikan diri dari alat

⁷⁴ Dwi Prasdi N, dkk. *Golkar Retak?*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi. Tahun 1999, hlm. 7.

⁷⁵ *Op.cit.*

kekuasaan Orde Baru menjadi aktor penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia.

Teori struktural fungsional digunakan untuk menganalisis bagaimana Golkar sebagai institusi politik berfungsi dalam sistem sosial Orde Baru. Merton membedakan antara fungsi nyata dan fungsi tersembunyi dari sebuah institusi. Dalam hal ini, Golkar secara nyata berfungsi sebagai alat stabilisasi politik dan pilar kekuasaan Soeharto, namun secara tersembunyi juga menimbulkan disfungsi seperti fragmentasi internal dan resistensi terhadap perubahan. Merton juga menyoroti pentingnya diferensiasi sosial dan stratifikasi dalam organisasi, di mana posisi-posisi strategis diisi oleh individu dengan bakat dan kemampuan berbeda, sesuai harapan masyarakat dan kebutuhan sistem. Ketika krisis melanda, fungsi laten Golkar sebagai “stabilisator ambigu” muncul, yakni beradaptasi dengan tuntutan reformasi melalui restrukturisasi internal dan perubahan strategi politik.